

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan di kota metropolitan seperti Bandung menjadi masalah yang kompleks untuk dipecahkan dan bersifat multidimensional. Kemiskinan ini berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Menurut Kuncoro (2000) dalam (Gultom dan Patnasari, 2016) kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mencapai taraf hidup minimum. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan pangan maupun non-makanan yang diukur dengan pengeluaran. Kemudian menurut Ravallion 1998 dalam (Kawulur, Koleangan, dan C. Wauran, 2019) Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang atau daerah tidak dapat meningkatkan kehidupan yang lebih layak atau bisa dapat dikatakan tidak dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat periode Maret 2012 hingga Maret 2023 secara umum menunjukkan tren penurunan baik secara angka maupun presentase. Sebelumnya pada bulan Maret 2020 hingga Maret 2021 angka kemiskinan melonjak tajam akibat pda nemi virus corona yang meldana Indonesia, termasuk Kota Bandung.

Namun pada Maret 2022 hingga Maret 2023, kemiskinan di Kota Bandung diperkirakan kembali menurun. Jumlah penduduk miskin di Kota Bandung pada Maret 2023 mencapai 102,80 ribu jiwa. Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 7,02 ribu orang dan survei sebelumnya 109,82 ribu jiwa. Proporsi penduduk miskin di Kota Bandung pada Maret 2023 tercatat sebesar 3,96 persen, turun 0,29 persen poin persentase dibandingkan 4,25 persen Maret 2022.



Gambar 1.1 Infografis Profil Kemiskinan Kota Bandung, Maret 2023
 Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Menurut Portal Jabar, 2023 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung per 1 Desember 2023, pengendalian inflasi Kota Bandung pada November 2023 berdampak signifikan terhadap beberapa sektor, seperti berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Data inflasi *month to month* Kota Bandung terhadap Oktober 2023 sebesar 0,22 persen. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan inflasi Jawa Barat sebesar 0,36 persen dan nasional

sebesar 0,38 persen. Pada inflasi *month to month*, lima komoditas pasar yang danil terhadap inflasi diantaranya cabai rawit, cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, dan beras. Sedangkan inflasi *year on year* terhadap November 2022 sejumlah 2,36 persen. Angka ini berada di bawah inflasi *year on year* Jawa Barat sebesar 2,85 persen dan nasional sebesar 2,86 persen. Komoditas yang ikut danil dan *year on year* antara lain, rokok kretek filter, cabai merah, sewa rumah, dan emas perhiasan.

Pengendalian inflasi ini menjadikan posisi inflasi Kota Bandung juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1,2 juta orang, sehingga pengangguran berkurang sekitar 20,7 ribu orang. Pertumbuhan ekonomi juga mendorong penciptaan lapangan kerja yang berdampak pada penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung.

Menurut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung tahun 2023 dalam Portal Jabar terdapat 24,95 persen status pekerjaan utama penduduk Kota Bandung pada Agustus adalah wirausaha mandiri. Ini merupakan pekerjaan kedua terbanyak setelah buruh/karyawan/pegawai sebesar 56 persen. Presentase penduduk miskin di Kota Bandung pun menurun. Pada Maret 2023 tercatat sebanyak 102.000 orang atau 3,96 persen penduduk miskin di Kota Bandung. Ini menurun dari Maret 2022 yang sebelumnya berjumlah 109.000 orang atau 4,25 persen penduduk miskin di Kota Bandung.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengatur bahwa pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menangani keluarga miskin di tingkat daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Salah satu

satuan kerja daerah yang bertanggung jawab dalam pemenuhan tugas untuk urusan pemerintah di bidang sosial adalah Dinas Sosial. Dalam rangka untuk mengurangi angka kemiskinan Dinas Sosial merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat pada bidang kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, peneliti memilih Dinas Sosial Kota Bandung sebagai obyek penelitian di dasarkan pada pertimbangan karena Dinas Sosial Kota Bandung memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berbasis pelayanan terarah, berkelanjutan, dan terpadu, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan pemberdayaan khususnya pertanian perkotaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung bidang pemberdayaan sosial (Dayasos). Berdasarkan Pasal 19 ayat (4) huruf e Peraturan Walikota 14 Tahun 2021, Departemen Pendukung dan Pemberdayaan sesuai dengan amanatnya menyelenggarakan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi masyarakat miskin dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial. Mengatasi masyarakat miskin di Kecamatan Rancasari Kota Bandung dan memutus rantai kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin secara optimal, efektif dan efisien serta memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran.

Sektor pertanian merupakan sektor utama yang memenuhi kebutuhan pangan bagi keberlangsungan hidup manusia. Daerah pedesaan dengan wilayah produksi yang luas mempunyai sektor pertanian yang sangat berkembang. Namun, mencapai

keseimbangan ketahanan pangan juga memerlukan pengembangan pertanian perkotaan melalui pemanfaatan lahan dan sumber daya alam secara optimal. Secara umum pertanian perkotaan atau biasa disebut *Urban Farming* merupakan suatu kegiatan pertanian yang dilakukan dengan ide memanfaatkan lahan-lahan kecil yang kosong di perkotaan. Hal ini, *Urban Farming* merupakan salah satu program dari Dinas Pertanian yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Bandung untuk menyelenggarakan pemberdayaan bagi keluarga miskin yang bertujuan untuk membantu penanganan kemiskinan di Kecamatan Rancasari Kota Bandung.

Untuk membantu keluarga miskin dalam memenuhi konsumsi makanan yang bergizi dan mengurangi pengeluaran keluarga. *Urban Farming* dilakukan dengan cara memanfaatkan lahan yang terbatas di perkotaan untuk aktivitas pertanian diperkotaan untuk aktivitas pertanian. Salah satu contohnya adalah dengan menanam sayuran di botol plastik bekas disekitar rumah, atau yang lain. Apabila setiap rumah tangga menerapkan *Urban Farming* dirumahnya, tentu saja ini akan berdampak pada ekonomi rumah-tangganya. Kebutuhan sayur-mayur maupun apotek hidup bisa dipenuhi sendiri, pada akhirnya hal ini akan menekan permintaan akan komoditi tersebut, sehingga harganya akan relatif stabil. Selain itu, rumah tangga yang melaksanakan *Urban Farming* akan mampu melakukan penghematan, sehingga pendapatannya bisa dialokasikan untuk hal lain.

Golder dalam Haqi dan Armansyah (2023) mengemukakan bahwa *Urban Farming* memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan pertanian di pedesaan, pertanian perkotaan menawarkan bentuk yang beragam, antara lain bentuk kegiatan sosial dan komersial, harmonisasi dengan penggunaan sumber daya yang ada di perkotaan, dan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan

produktivitas. Mereka mempunyai ciri-ciri yang unik, misalnya perbedaan kedekatannya. Cara mudahnya adalah memasarkan hasil produksinya. Di Indonesia, perkembangan pertanian perkotaan dimulai pada masa krisis ekonomi tahun 1997-1998, dengan adanya fenomena revitalisasi pertanian perkotaan sebagai solusi mengatasi permasalahan gizi. Konsep pertanian perkotaan juga berkembang di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta.

Urban Farming telah dilaksanakan di berbagai wilayah termasuk di Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Setelah melakukan asesmen ternyata pelatihan yang diminati oleh para KPM ini adalah *Urban Farming*. Peserta program *Urban Farming* ini memiliki 25 orang peserta atau 25 keluarga yang ada di Kecamatan Rancasari. Program *Urban Farming* ini dilakukan dalam bentuk program "BURUAN SAE". Pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung tahun 2020 meluncurkan kota terpadu yang inovatif bernama "BURUAN SAE" pada tahun 2020 untuk menjaga ketahanan pangan dan mengatasi permasalahan ketersediaan pangan melalui pemanfaatan kebun. Nama "BURUAN SAE" berasal dari bahasa Sunda "BURUAN" yang berarti kebun, dan kata "SAE" dalam bahasa Sunda berarti "baik" dan sehat berarti alam dan ekonomi, yang merupakan akronim dari sebuah kata. Tujuan dari "BURUAN SAE" adalah untuk mendorong masyarakat Kota Bandung untuk secara mandiri memproduksi pangan yang sehat, alami dan hemat biaya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. "BURUAN SAE" juga merupakan upaya menjadikan Bandung kota hijau. Saat ini "BURUAN SAE" mengoperasikan lebih dari 300 unit di Kota Bandung.

“BURUAN SAE” dengan tujuannya untuk mendorong masyarakat mandiri dalam memproduksi pangan yang sehat merupakan salah satu upaya untuk membentuk keberfungsian sosial keluarga miskin. Keberfungsian sosial merupakan salah tujuan yang ingin dicapai didalam praktik Pekerjaan Sosial. Menurut Taftazani, Purnama, dan Raharjo (2020) dalam tugasnya menciptakan keberfungsian sosial, praktik pekerjaan sosial melakukan tiga bentuk aktivitas yang sesuai dengan keadaan atau kebutuhan bisa penggunaan layanan yaitu bisa berupa bantuan sosial, penyembuhan (*treatment*), dan tumbuh kembang manusia atau yang disebut juga sebagai pelayanan pengembangan. Pada pelayanan pengembangan pekerja sosial berkerjasama dengan orang-orang yang tidak teridentifikasi masalah keberfungsian sosial, namun memiliki kebutuhan atau aspirasi untuk dapat memaksimalkan potensi dalam diri mereka. Pekerja sosial menggunakan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan beragam kebutuhan.

Pekerja sosial yang berfokus pada pemberdayaan berusaha mengembangkan kapasitas klien untuk memahami lingkungan mereka, membuat pilihan, bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan mempengaruhi situasi kehidupan mereka melalui organisasi dan advokasi. Pekerja sosial juga berusaha untuk mendapatkan distribusi sumber daya yang lebih adil dan kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Program *Urban Farming* ini salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Pekerja sosial untuk mendukung pemberdayaan. Program *Urban Farming* tidak hanya memberikan akses terhadap sumber daya yang penting seperti makanan segar, tetapi juga mengajarkan keterampilan berkebun kepada klien. Melalui kegiatan berkebun, klien dapat belajar tentang pentingnya lingkungan mereka dan

bagaimana mereka dapat berkontribusi secara positif terhadapnya.

Selain itu, program *Urban Farming* juga membuka peluang bagi pekerja sosial untuk memperjuangkan distribusi sumber daya yang lebih adil. Dengan memastikan bahwa semua anggota komunitas memiliki akses yang sama terhadap program ini, pekerja sosial dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Mereka juga dapat menggunakan program ini sebagai platform untuk memperjuangkan keadilan sosial dan mengadvokasi hak-hak klien mereka.

Secara keseluruhan, melalui kombinasi pemberdayaan individu dan advokasi sosial, pekerja sosial dapat memainkan peran yang signifikan dalam membantu klien mereka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri sambil juga berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih luas dalam masyarakat. Program *Urban Farming* adalah salah satu contoh konkret dari bagaimana pendekatan ini dapat diimplementasikan dengan efektif dalam praktik pekerjaan sosial.

Penelitian mengenai program *Urban Farming* dengan berbagai topik sudah banyak dilakukan, umumnya penelitian berfokus pada aspek-aspek sebagai berikut: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program *Urban Farming* KAMIKITA *Community Centre* Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh (Rina Fauzina 2022); Implementasi Program *Urban Farming* di Kawasan Permukiman Dalam Peningkatan Presentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar (Siti Ainun Rahman, 2018) ; Evaluasi Program Pengembangan Pertanian Perkotaan (*Urban Farming*) Di Jakarta Barat (Saputro, 2023). Pada umumnya, penelitian tersebut masih bersifat parsial dari pelaksanaan program *Urban Farming* ini. Kebaruan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sejauh ini belum ditemukan penelitian

yang mengkaji dari sisi sumber daya yang digunakan, dan keterlibatan *stakeholder* untuk keberlanjutan program.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bertajuk “Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Program *Urban Farming* di Kecamatan Rancasari Kota Bandung”. Terdapat komponen-komponen atau aspek-aspek dalam suatu teori yang berkaitan dengan judul peneliti. Teori ini penting bagi peneliti untuk dijadikan pedoman dalam merumuskan masalah yang diteliti. Teori yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang ditopang dengan teori ACTORS. Teori ACTORS ini memfokuskan pada aktor-aktor individu atau kelompok yang terlibat dalam pembangunan, dan bagaimana mereka menggunakan sumber daya, mengambil keputusan, dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan.

Penelitian yang digunakan sebelumnya untuk mendapatkan bahan ataupun materi perbandingan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian Peneliti sekarang yaitu pada aspek lokasi penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, teori utama yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian, dan juga hasil penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan jawaban atas apa yang harus dilakukan oleh keluarga miskin agar bisa hidup tanpa tergantung pada bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui program *Urban Farming* dalam menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan bagi keluarga miskin dapat berkembang, meningkatkan kemampuan keluarga miskin dalam membangun kemandirian, dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu “Bagaimana Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Program *Urban Farming* di Kecamatan Rancasari Kota Bandung?”

Adapun perumusan masalah penelitian ini difokuskan pada sub-sub permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana Program *Urban Farming* menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan bagi keluarga miskin dapat berkembang di Kecamatan Rancasari Kota Bandung?
3. Bagaimana program *Urban Farming* meningkatkan kemampuan keluarga miskin dalam membangun kemandirian di Kecamatan Rancasari Kota Bandung?
4. Bagaimana program *Urban Farming* dalam menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan bagi keluarga miskin di Kecamatan Rancasari Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian terkait Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Program *Urban Farming* di Kecamatan Rancasari Kota Bandung adalah untuk memperoleh gambaran tentang:

1. Karakteristik informan
2. Program *Urban Farming* dalam menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan bagi keluarga miskin dapat berkembang di Kecamatan Rancasari Kota Bandung.

3. Program *Urban Farming* dalam meningkatkan kemampuan keluarga miskin dalam membangun kemandirian di Kecamatan Rancasari Kota Bandung.
4. Program *Urban Farming* dalam menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan bagi keluarga miskin di Kecamatan Rancasari Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktik.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan mengenai terhadap pengembangan ilmu pekerjaan sosial khususnya dalam menangani masalah kemiskinan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan dalam kegiatan penelitian di bidang ilmu Kesejahteraan Sosial.

2. Manfaat Praktis

Dalam praktiknya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai pemberdayaan keluarga miskin melalui pelatihan *Urban Farming* untuk memutuskan rantai angka kemiskinan di Kecamatan Rancasari Kota Bandung dan kepada program studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial dalam profil lulusan analisis Pemberdayaan sosial.

1.5 Sistematika Penelitian

Penelitian Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Program *Urban Farming* di Kecamatan Rancasari Kota Bandung ini disusun berdasarkan sistematika Penelitian skripsi sebagai berikut :

- BAB I** **PENDAHULUAN**, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB II** **KAJIAN KONSEPTUAL**, memuat tentang penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan penelitian.
- BAB III** **METODE PENELITIAN**, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar belakang penelitian, sumber data dan cara menemukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.
- BAB IV** **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.
- BAB V** **USULAN PROGRAM**, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan.
- BAB VI** **SIMPULAN DAN SARAN**, memuat tentang kesimpulan dan saran penelitian mengenai Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Program *Urban Farming* di Kecamatan Rancasari Kota Bandung.

